

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF LOCAL GOVERNMENT CHARACTERISTICS, PARLIAMENT MEMBERS, AND AUDIT FINDINGS TO DISCLOSURE LEVEL OF FINANCIAL STATEMENT PROVINCE, LOCAL GOVERNMENT, MUNICIPALITIES 2014

By

Lilis Suryani

The purpose of this study is to examine the influence of local government characteristics, parliament members, and audit findings to disclosure level of financial statement province, local government, municipalities 2014 used in this research are depend, age of local government, the number of Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). This research also used variable such as the total number of parliament members and total number of audit findings. Disclosure of financial statement is measure by 34 items based on governmental accounting standards.

This study use purposive sampling method. The sample consists of 477 Indonesian local government financial reports of the year 2014. The statistical analysis use descriptive statistics multiple regression. Result show that the average disclosure level Indonesian local government is 40,93%.

The results of regression analysis show that variabel depend, the age of local government, and the number of parliament members are significantly positive effect on the level of Indonesian local government financial reports. The variables of the number of SKPD, and audit findings has no significant effect on the disclosure levels .

Keywords: audit findings, governmental accounting standards (SAP), local government characteristics, mandatory disclosure.

ABSTRAK

Pengaruh Karakteristik Pemerintah, Pengawasan Legislatif Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Provinsi, Kabupaten, Kota Tahun 2014

Oleh

Lilis Suryani

Maksud dari penelitian ini untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah, pengawasan legislative, dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, kota tahun 2014. Karakteristik pemerintah daerah yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari ketergantungan daerah, umur pemerintah daerah, jumlah SKPD. Penelitian ini juga menggunakan variabel jumlah anggota legislatif sebagai ukuran dari variabel pengawasan legislatif dan total jumlah temuan audit. Pengungkapan Laporan Keuangan diukur berdasarkan 34 item pengungkapan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel penelitian terdiri dari 477 laporan keuangan pemerintah provinsi, kabupaten, kota tahun 2014 yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan. Analisis statistik menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pengungkapan pada pemerintah provinsi, kabupaten, kota sebesar 40,93%.

Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa variabel ketergantungan daerah, umur pemerintah daerah, dan pengawasan legislatif berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan variabel jumlah SKPD dan temuan audit, tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan LKPD.

Kata kunci: temuan audit, Standar Akuntansi Pemerintahan, karakteristik pemerintah, pengungkapan wajib.